

EKSISTENSI DAN TANTANGAN BAHASA BALI PADA ERA GLOBALISASI

Oleh

I Nyoman Suwija

Email : prof.inyomansuwija@gmail.com

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Abstrak

Bahasa Bali merupakan khazanah budaya yang patut dilestarikan sebagai akar budaya Bali sekaligus mewahana pariwisata Bali. Sebagai upaya dalam pelestarian Bali, pemerintah daerah Bali sudah banyak menerbitkan peraturan dan kebijakan, namun seiring perkembangan zaman, posisi dan eksistensi bahasa Bali terdesak sehingga cukup memprihatinkan.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana politik kebijakan bahasa nasional dan bahasa daerah di Indonesia? (2) Bagaimanakah eksistensi bahasa Bali pada era globalisasi?, (3) Bagaimanakah tantangan bahasa Bali pada era globalisasi? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik baca dan catat dan metode wawancara dengan teknik rekam. Data-data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis dan disajikan dengan metode informal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini bahasa Bali masih eksis dalam posisi rentan (tidak aman dan tidak terancam punah). Peluang bahasa Bali cukup meyakinkan karena terdapat kemajuan upaya pemertahanan melalui kebijakan pemerintah daerah Bali yaitu pengangkatan guru dan penyuluhan bahasa Bali secara rutin baik sebagai PNS maupun PPPK. Sementara tantangannya masih berat akibat derasnya arus globalisasi dan pergaulan masyarakat semakin majemuk yang telah mendesak pemakaian bahasa daerah Bali.

Kata Kunci: *Eksistensi, Tantangan, Bahasa Bali*

1. PENDAHULUAN

Wacana globalisasi yang telah menjadi mode dalam bidang ilmu-ilmu sosial merupakan kata kunci yang sering digunakan oleh para pakar ilmu pengetahuan, politisi, dan wartawan untuk menarik perhatian masyarakat. Hampir di semua penjuru dunia orang mengatakan bahwa saat ini hidup dan kehidupan ditentukan oleh proses global, dimana garis batas budaya nasional, ekonomi nasional, dan wilayah nasional semakin kabur. Konsekuensinya adalah akan terjadi perubahan tatanan kehidupan masyarakat dari konsep lokal, nasional, dan global. Perubahan tersebut bukan saja muncul di permukaan sebagai ciri dari budaya kapitalistik, namun juga merusak perilaku (ideologi). Perubahan tersebut hendaknya disadari sebagai konsekuensi logis

dari sistem budaya global. Perubahan yang dikehendaki bukanlah perubahan yang merusak nilai-nilai, norma-norma yang telah mantap dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, melainkan terbatas pada yang termodifikasi dengan beradaptasi secara bertahap. Salah satu bentuk perubahan itu di Indonesia adalah reformasi yang berbeda dengan revolusi.

Reformasi pada dasarnya ingin menegakkan kembali suatu tatanan masyarakat yang dianggap menyimpang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan tercermin pada berbagai aspek kehidupan, termasuk wilayah politik yang tercermin pada berbagai produk kebijakan, khusus dalam hal ini kebijakan bahasa di Indonesia. Persoalan berlakunya politik bahasa terutama mengenai kedudukan dan peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, yang telah diberlakukan sejak Indonesia merdeka.

Bahasa sebagai komponen dari paham kebangsaan jelaslah tercantum di dalam Trilogi Sumpah Pemuda yang telah diinterpretasikan antara lain dengan satu bahasa. Unsur bahasa dijadikan komponen yang penting di dalam trilogi tersebut, karena kedudukan dan peran bahasa sangat strategis untuk pembentukan bangsa Indonesia sebagaimana hal tersebut tampak dalam peran bahasa dalam konsep kebangsaan yang muncul pada abad ke-19 di Eropa. Keterkaitan ini menjadi penting dipahami karena konsep kebangsaan yang muncul di Eropa (Barat) memberi pengaruh dalam konsep kebangsaan Indonesia yaitu sebagai produk dari modernisme. Dapatlah dipahami bahwa mengapa penafsiran teks pada trilogi tentang bahasa itu terjadi sehingga tercermin juga di dalam politik bahasa yang pada dasarnya mengacu pada uniformitas. Jadi konsep kebangsaan yang mengacu pada makna persatuan dan ditafsirkan seperti itu telah menyebabkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memposisikan bahasa daerah sebagai bahasa pelengkap saja.

Terjadilah reaksi terhadap keadaan tersebut oleh berbagai kalangan termasuk para ahli bahasa untuk memberi kedudukan bahasa daerah sebagai lambang identitas kebudayaan daerah atau budaya yang unik, namun dalam kenyataannya tidak seorang pun mampu mengubah posisi tersebut, bahkan kemudian muncul tulisan-tulisan dari berbagai kelompok kritis, banyak ahli bahasa yang mampu memberikan cakrawala pemikiran tentang posisi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dengan terjadinya

reformasi, terjadi pula gugatan terhadap ketimpangan kedudukan serta pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

2. PEMBAHASAN

2.1 Politik Kebijakan Bahasa Nasional dan Bahasa Daerah Bali

Secara historis, perkembangan paham nasionalisme atau paham kebangsaan tersimpul di dalam Trilogi Sumpah Pemuda. Di situ dapat ditafsirkan suatu ide atau keinginan para pemuda saat itu untuk memiliki identitas nasional yakni menjunjung satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana perkembangan penafsiran dari titik tolak persatuan, hingga sampai pada gugatan terhadap negara yang menginginkan suatu hak hidup bahasa daerah. Paham nasionalisme tersebut rupanya dipengaruhi oleh nasionalisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-19 yang mengunggulkan anti kesatuan, keseragaman, dan homogenitas sehingga melahirkan konsep negara bangsa. Konsep semacam ini telah mengalami perubahan ke arah pluralisme yang diakibatkan oleh arus pemikiran reformasi yang diilhami oleh konsep pemikiran kritis yaitu *postmodernisme*. (1)

Globalisasi membawa masuknya budaya barat ke Indonesia, seperti gaya hidup, musik, dan fashion. Hal ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap budaya lokal. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap budaya lain dan dapat memperkaya pemahaman budaya lokal, sedangkan dampak negatifnya adalah budaya lokal menjadi terpinggirkan dan luntur. Arus globalisasi mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya yang lama dan menghadirkan nilai-nilai budaya baru. Hal ini dapat berdampak positif dan negatif terhadap budaya lokal. Dampak positifnya adalah masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa nilai-nilai budaya lama menjadi terabaikan dan hilang (2).

Menurut Sukrawati, budaya lokal Bali sudah sejak lama bersentuhan dengan yang namanya globalisasi. Hal ini berdampak sangat besar terhadap potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali, di antaranya dapat bersinergi dengan pengaruh globalisasi. Dalam bidang bahasa dan sastra khususnya, pengaruh globalisasi menunjukkan sesuatu yang positif dan negatif. Dampak positifnya dapat menambah

pengetahuan masyarakat Bali terhadap perkembangan bahasa dan sastra, negatifnya, bahasa dan sastra kurang diminati oleh pemiliknya (3).

Tuntutan hak hidup bahasa daerah sebagai suatu unsur kebudayaan daerah di Indonesia telah meluas sebagaimana yang tercermin pada gugatan terhadap konsep kebudayaan nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu penjinakan dan pemisahan bentuk-bentuk kebudayaan lokal yang dilakukan melalui sistem kekuatan birokratis pemerintah di daerah. Ujung-ujungnya kebudayaan lokal tercabut dari roh dan akarnya hingga yang muncul kemudian adalah wujud luarnya saja yakni kesenian lokal. Cukup menyedihkan jika jiwa kesenian lokal itu pun sirna, ketika bentuknya didesain ulang untuk tujuan pariwisata, tayangan televisi atau festival. Bersamaan dengan munculnya konsep keberagaman itu, terkait pula konsep multikulturalisme, adanya keberagaman bahasa yang juga dapat menimbulkan konflik karena adanya saling kontak antara mereka, hingga akan menimbulkan daya kompetisi antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Dalam kompetisi bahasa itu bisa saja terjadi saling mempengaruhi bahkan saling mematikan satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan multikulturalisme dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sangat relevan pada era reformasi saat ini karena makna reformasi menyentuh juga sisi-sisi penyimpangan kebijakan kebahasaan yang pada masa lalu cenderung ke arah kekuasaan homogenik negara yang bersifat determinis terhadap segala kebijakan, pada hal dalam konteks globalisasi sentralisasi akan kehilangan identitas, sebab batas-batas kultural semakin tipis, bahkan sangat mungkin kabur. Dalam kontek keindonesiaan, kajian ulang terhadap butir mutiara itu akan tetap penting dan selalu relevan, terutama sehubungan dengan ciri keindonesiaan yang multietnis dan juga multikultural serta berakibat pada multilingual. Ke depan ada kecenderungan akan semakin menurun kadar multilingualnya, suatu langkah besar harus diayunkan agar jangan sampai Indonesia yang multilingual menuju monolingual.

Fenomena kebahasaan masyarakat Indonesia yang multibudaya memerlukan pemahaman kebahasaan bersifat lokal, nasional, dan global yang mempertimbangkan masalah-masalah kebahasaan yang mendesak untuk diselesaikan terutama berkaitan dengan penggunaan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bagaimana keberadaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing diberikan ruang gerak sesuai hak kebudayaannya secara utuh. Hal ini telah muncul sebagai permasalahan

yang sah mengingat adanya suatu hak terkait hak azasi manusia dan hak azasi linguistik untuk menjamin kehidupan setiap bahasa yang ada untuk tetap hidup dan berkembang sebagai mana mestinya.

Munculnya berbagai reaksi terkait eksistensi bahasa daerah di Indonesia secara nasional memang telah tampak di dalam lembaga pemerintahan yaitu pada ‘Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa’ sehingga namanya pun berubah menjadi ‘Pusat Bahasa’ saja. Perubahan nama mempunyai makna cukup luas yang menyangkut pula peran dan kedudukan bahasa itu sendiri. Dalam beberapa puluhan tahun terakhir ini di dunia linguistik terapan makin kuat dan gencar arus atau gerakan yang membela hak-hak hidup bahasa-bahasa ibu.

Purwo (2000: 27) menyatakan, bahwa di dalam masyarakat yang beradab sudah harus tidak diperdebatkan lagi hak-hak azasi untuk mempertahankan bahasa ibu seseorang. Itu sudah jelas dengan sendirinya merupakan suatu hal yang fundamental, merupakan hak azasi linguistik (*linguistic human right*). Pernyataan lebih keras lagi disampaikan oleh Breton (2000), pembunuhan bahasa (*lingucide*) apakah itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja merupakan satu hal yang jitu untuk menghabisi kelompok etnis (*ethnocide*) adalah suatu tindakan menelanjangi atau mencukur habis suku-suku bangsa dari nilai-nilai luhur budaya mereka. Hal azasi manusia bukanlah hanya menyangkut segi fisik manusia, melainkan juga bahasa (4).

Berdasarkan paparan di atas, mestilah diambil jalan keluar yang memberikan hak hidup semua bahasa daerah di Indonesia yang tidak akan mungkin pula mematikan berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa asing sebagai bahasa globalisasi. Di tengah era global ini, persoalan bahasa hendaknya dilihat dalam kaitan dengan konsep multikulturalisme yang menurut Edi Sedyawati bahwa konsep multikulturalisme sebagai konsep ‘Aneka Budaya’ (5)

Konsep multikulturalisme merupakan issu global yang harus disikapi berkaitan dengan bahasa sehingga dapat dijadikan acuan sesuai pandangan pemberdayaan masyarakat. Menurut Alam, dalam konteks *civil society* masalah pemberdayaan masyarakat ini sangat ditekankan. *Civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara negara dan komunitas local dimana terhimpun suatu kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan serta kemandirian masyarakat terhadap

kekuasaan negara dan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat inilah sebagai sebuah konsep kunci yang turut mewarnai kehidupan politik bahasa di Indonesia (6).

Jika berbicara politik kedaerahan di Bali khususnya, berkaitan erat dengan visi-misi Pemerintah Daerah Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang berarti ‘Menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sekala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila (7).

Dalam implementasi visi-misi tersebut, Pemerintah Daerah Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster merumuskan 44 tonggak peradaban pembangunan Bali Era Baru. Ada tiga poin di antaranya yang menyangkut kebijakan politik kedaerahan yaitu pada: (Tonggak 7) Memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, (Tonggak 8) Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (Tonggak 9) Menciptakan Keyboard Aksara Bali. Wujud nyata dari pemuliaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, terbitnya Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Bali No 3 Tahun 1992 karena sudah tidak sesuai lagi dengan era kesejagatan (8). Diterbitkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 1918 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (9).

2.2 Eksistensi Bahasa Bali pada Era Globalisasi

Banyak kalangan yang menghawatirkan eksistensi bahasa daerah Bali karena Bali merupakan dinasti pariwisata Indonesia bagian tengah yang telah dilanda oleh arus globalisasi. Belakangan ini minat pemuda Bali untuk belajar bahasa Bali dan mengambil kuliah pada Prodi Bahasa Bali sangat langka. Hal ini tidak terlepas dari masalah prestise, harga diri, dan gengsi sekaligus imbas besar globalisasi dan sektor pariwisata. Saat ini kebanyakan anak-anak muda Bali tertarik ke sektor pariwisata karena sudah terbukti banyak yang berhasil melalui jalur tersebut.

Bagus, dkk. (1998) mengatakan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Bali dalam situasi resmi dan tidak resmi. Fungsi dalam situasi resmi antara lain: (1) Fungsi

bahasa Bali di kantor; (2) Fungsi bahasa Bali dalam pertemuan formal; (3) Fungsi bahasa Bali dalam pendidikan formal; (4) Fungsi bahasa Bali dalam karya tulis; (5) Fungsi bahasa Bali dalam media massa. Fungsi bahasa Bali dalam situasi tidak resmi yaitu: (1) Fungsi bahasa Bali dalam lingkungan keluarga; (2) Fungsi bahasa Bali antarkeluarga; (3) Fungsi bahasa Bali dalam upacara dan agama; (4) Fungsi bahasa Bali dalam bidang kesenian. (10).

2.2.1 Eksistensi Bahasa Bali pada Situasi Resmi

Berdasarkan pengamatan penulis, fungsi bahasa Bali di kantor sudah melemah karena pada umumnya pergaulan di kantor terutama rapat-rapat perkantoran sudah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menetapkan hari-hari berbahasa Bali melalui Pasal 4 Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, masih cukup banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Sebagai contoh pada setiap persembahyang Purnama di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah, guru atau pemimpin persembahyang sudah mapan berbahasa Bali, namun pimpinan perguan tinggi dan para kepala sekolah yang memberikan arahan sebelum dan sesudah acara persembahyang masih banyak berbahasa Indonesia (tidak mengindahkan ketentuan berbahasa daerah Bali). Pada pergaulan tidak resmi di kantor atau lembaga pendidikan terjadi pergaulan bilingual atau dwibahasa. Ada yang terbiasa berbahasa Indonesia, ada juga sebagian yang berkomunikasi dengan bahasa Bali.

Fungsi bahasa Bali pada pertemuan formal (kedinasan) hanya digunakan oleh para guru dan dosen bahasa Bali saat mengajarkan materi bahasa daerah Bali. Namun pada situasi formal adat Bali masih cukup eksis sesuai bunyi Pasal 3 (poin b) yaitu Bahasa Bali digunakan sebagai alat komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat Bali, dan budaya Bali. Misalnya kata sambutan (sembrama wecana bendesa atau kelian adat dan yang punya upacara agama dalam berbagai kegiatan keagamaan), rapat-rapat banjar adat, rapat desa adat, rapat seka gong, rapat seka teruna, rapat subak abian dan subak yeh, rapat pecalang, rata-rata sudah berbahasa Bali.

Fungsi bahasa Bali dalam karya tulis masih terbatas. Hal ini hanya eksis pada ruang khusus seperti Rubrik ‘*Orti Bali*’ pada Harian *Bali Post* setiap hari Minggu saja. Di sisi lain, penulisan makalah berbahasa Bali hanya eksis ketika penyelenggaraan Kongres atau Pasamuan Alit dan Pesamuhan Agung Bahasa Bali. Di samping itu pada setiap penyusunan skripsi tugas akhir mahasiswa Prodi Sastra Agama dan Bahasa Bali

di UHN I Gusti Bagus Sugriwa, eksis menggunakan bahasa Bali. Ada juga artikel-artikel berbahasa Bali yang ditulis untuk diunggah pada majalah dan jurnal berbahasa Bali seperti Jurnal Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali di STKIP Mpu Kuturan Singaraja dan Jurnal Pendidikan Bahasa Bali di Undhiksa Singaraja.

Fungsi bahasa Bali dalam media massa terdiri atas media cetak dan media elektronik. Pada media cetak yaitu Harian Bali Post Minggu ruang '*Bali Orti*' dan pada media elektronik masih eksis pada dua stasiun televisi di Bali yaitu:

- 1) TVRI Bali sebagai stasiun televisi publik yang secara resmi menyiarakan program siaran dalam bahasa Bali, di antaranya:
 - (a) Acara Gatra Bali, Siaran Berita berbahasa Bali setiap petang hari,
 - (b) Acara Nyastrala Bali, Siaran pembinaan bahasa Bali setiap hari Senin,
 - (c) Acara Gegirang, Siaran matembang Bali pada setiap Minggu malam.
 - (d) Acara Dedalu, Program lokal yang membahas isu-isu di Bali.
 - (e) Acara Mesatua, Program lokal yang berfokus pada cerita rakyat Bali.
 - (f) Acara Swadesa, Program yang mengangkat tema kearifan lokal Bali.
 - (g) Acara Bondres Post, Pesan penting melalui lawakan berbahasa Bali.
- 2) Bali TV sebagai stasiun televisi lokal swasta, juga menyajikan berbagai acara yang menampilkan kehidupan sosial dan budaya Bali, yang sering menggunakan bahasa Bali seperti:
 - (a) Acara Orti Bali, Siaran berita berbahasa Bali setiap sore hari
 - (b) Acara Wirasa, Program dialog/diskusi budaya Bali berbahasa Bali
 - (c) Acara Taksu, Program khusus membahas keunikan budaya Bali
 - (d) Acara Lilacita, Program huburan menampilkan kesenian tradisi Bali
 - (e) Acara Ajeg Bali, Program pelestarian identitas kebudayaan Bali,
 - (f) Acara Ista Dewata, Program kunjungan ke pura-pura penting di Nusantara
 - (g) Acara Nangun Yadnya, Program khusus tentang upacara adat dan agama

2.2.2 Eksistensi Bahasa Bali pada Situasi Tidak Resmi

Eksistensi bahasa Bali pada situasi tidak resmi dapat dilihat melalui beberapa sisi pengamatan yaitu (1) Fungsi bahasa Bali dalam lingkungan keluarga; (2) Fungsi bahasa Bali antarkeluarga; (3) Fungsi bahasa Bali dalam upacara adat dan agama; dan (4) Fungsi bahasa Bali dalam bidang kesenian.

Fungsi bahasa Bali dalam lingkungan keluarga sudah tergerus oleh derasnya arus globalisasi dan pergaulan masyarakat Bali yang semakin majemuk. Pemakaian bahasa Bali pada masyarakat desa dan di pegunungan yang masyarakatnya masih homogen, penggunaan bahasa Bali masih eksis. Hampir 80 persen penduduk Bali yang di pedalaman dan pegunungan masih berkomunikasi dengan bahasa ibu yaitu bahasa daerah Bali. Semakin keluar desa, baik wilayah kecamatan maupun perkotaan dimana terdapat banyak pemukiman baru sudah tentu dihuni oleh bukan hanya suku Bali. Di sitalah terjadi akulturasi budaya yang berdampak bilingual. Walaupun di rumah anak-anak masih eksis berbahasa Bali bersama keluarganya, ketika mereka keluar bergaul bersama anak-anak bukan Bali, mereka terpaksa berbahasa Indonesia.

Eksistensi fungsi bahasa Bali antarkeluarga, kondisinya mirip dengan paparan di atas. Penggunaan bahasa Bali antarsuku Bali masih eksis juga pada penduduk Bali homogen di daerah pedesaan dan pegunungan. Para anggota keluarga desa setiap hari berkomunikasi dengan bahasa Bali. Main ke rumah keluarga atau tetangganya yang sama-sama suku Bali, penggunaan bahasa Bali masih eksis hingga sekarang. Oleh karena masyarakat suku Bali terdiri atas empat golongan kekerabatan yaitu Brahmana, Ksatria, Wesia, dan Sudra, maka pergaulan antarkeluarga Bali menggunakan bahasa Bali yang bertingkat-tingkat yang dikenal dengan *anggah-ungguh basa Bali*. Namun jika masuk pada wilayah perkotaan sangat tergantung pada tingkat pluralitas penduduk setempat. Warga Bali yang bertetangga dengan keluarga bukan warga Bali, dengan sendirinya akan memilih bahasa Indonesia sebagai media komunikasi.

Bahasa Bali cukup eksis dalam berbagai upacara adat Bali dan agama Hindu sebagai bahasa *pakraman* atau bahasa resmi adat Bali. Fungsi bahasa Bali yang paling menonjol adalah sebagai alat komunikasi dalam prosesi perkawinan adat Bali. Sejak mulai perkenalan diri oleh pihak keluarga laki-laki bersama keluarga wanita sudah memakai bahasa Bali. Dilanjutkan kemudian dengan ritual *memadik* atau *madharma suaka*, juga menggunakan bahasa Bali. Berlanjut pada upacara *majauman* dengan menghadirkan kelian dinas (kadus) dan kelian adat kedua belah pihak, semuanya menggunakan bahasa Bali yaitu bahasa Bali tingkatan halus. Di sela-sela itu dalam rangka menggarap berbagai persiapan sarana upakara dan upacara, pada setiap kegiatan menggunakan bahasa Bali. Demikian juga kegiatan keagamaan lainnya, baik

upacara *dewa yadnya, manusa yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, dan bhuta yadnya*, peran bahasa Bali tidak ketinggalan.

Di sampung berfungsi sebagai alat pergaulan keluarga, alat komunikasi antar-keluarga, serta dalam upacara adat dan agama, bahasa Bali juga berfungsi penting dalam pementasan seni pertunjukan tradisional Bali, di antaranya pada pertunjukan *wayang kulit, wayang wong, topeng pajegan, tari arja, topeng bondres, lawak Bali, peremon, drama gong, gambuh, kecak dag, sendratari, drama tari, drama klasik*, dan juga pada pertunjukan drama Bali modern. Sejak tahun 1970-an bahasa Bali juga digunakan di dalam penulisan lirik lagu-lagu pop Bali. Ribuan judul lagu-lagu pop Bali dari para pencipta, musisi, produser, dan artis penyanyi Bali telah menghiasi maraknya pentas musik dan lagu-lagu pop Bali.

Sejak munculnya Bend Putra Dewata milik Anak Agung Made Cakra tahun 1970-an hingga saat ini sangat banyak melahirkan artis Bali yang cukup dikenal oleh masyarakat Bali, seperti Yong Sagita, Yan Bero, Komang Rani, Alit Adiari, Ketut Bimbo, Yan Se, Ayu Saraswati, Komang Senior, Widi Widiana, Dek Ulik, Raka Sidan, Bayu Suta, Mang Jana, dan banyak lagi yang lainnya. Tanpa disadari lagu-lagu Bali yang dicipta dan dipopulerkan telah turut membantu pemertahanan bahasa Bali. Sekaligus mempertahankan eksistensi bahasa Bali yang berdampak pada posisi bahasa Bali memang tidak aman disebut rentan dan tidak terancam punah.

2.3 Tantangan dan Upaya Pemertahanan Bahasa Bali

2.3.1 Tantangan Pengembangan Bahasa Bali pada Era Globalisasi

Berbicara tantangan yang dihadapi, sepintas telah dipaparkan pada eksistensi di atas karena kedua hal ini saling berkaitan. Tantangan utama bahasa Bali ke depan adalah menghadapi persaingan bahasa-bahasa global yang memiliki pangsa pasar jutaan penutur aktif. Jalan keluar menghadapi tantangan tersebut adalah pengembangan konsep bilingual dan multilingual. Sebagai dampak pergaulan masyarakat Bali yang semakin kompleks, terjadi konsep kebahasaan yang disebut campur kode dan alih kode, bahkan telah beralih total ke bahasa Indonesia. Jadi penutur bahasa Bali telah perlahan-lahan beralih pada sistem, bukan sekadar campur kode dan alih kode. Keragaman penduduk Bali inilah salah satu sumber tantangan dalam pemertahanan bahasa Bali. Patut diakui bahwa loyalitas krama Bali terhadap bahasa ibunya sudah

menipis. Sudah banyak anak-anak Bali yang tidak lagi mengenal bahasa Bali sebagai bahasa ibunya, bahasa ibunya telah beralih ke bahasa Indonesia.

Tantangan terbesar lainnya yang dihadapi dalam upaya pemertahanan bahasa Bali adalah kondisi internal bahasa dan sastra Bali. Menurut Suweta (2021: 2) bahasa Bali tidak dapat dilihat hanya dari segi kelsinguitikan saja. Ada tiga aspek di dalam pembelajaran bahasa Bali yaitu bahasa, aksara, dan sastra yang membentuk jati diri kebudayaan Bali. Ketiga aspek tersebut merupakan campuran budaya, direkonstruksi oleh leluhur orang Bali menjadi produk kebudayaan yang sangat lekat dengan hidup dan kehidupan masyarakat Bali (11).

Faktor internal bahasa, aksara, dan sastra Bali yang paling tampak merupakan penyabab melemahnya minat generasi muda untuk turut ambil bagian dalam upaya pengembangan bahasa daerah Bali adalah adanya sistem bicara bahasa Bali yang disebut *anggah-ungguh basa Bali* yaitu bahasa Bali yang mengenal tingkatan bicara, ada bahasa *kasar* (jelek), bahasa *andap* (yang biasa, lepas hormat), bahasa *madia* (menengah), dan bahasa *alus* (menghormat). Sementara faktor internal lainnya, belajar bahasa Bali menggunakan dua huruf yaitu huruf Latin dan aksara Bali. Aksara Bali ini yang juga menjadi momok bagi anak-anak muda. Banyak yang beranggapan bahwa kuliah pada Prodi Bahasa Bali lebih banyak menekuni aksara Bali. Ada lagi yang mengatakan kuliah pada prodi bahasa Bali akan menjadi calon pemangku, sulinggih, bahkan menjadi *balian* atau dukun.

Pola pikir masyarakat penutur bahasa Bali sudah berbeda, banyak pula yang beranggapan bahwa bahasa Bali merupakan sesuatu yang kuna, katrok, tidak punya nilai ekonomi karena tidak bisa dipakai mencari uang. Ini juga tantangan serius yang dihadapi dalam upaya pemertahanan bahasa Bali. Para generasi muda Bali mayoritas tertarik ke jalur pariwisata daripada jalur pendidikan bahasa daerah Bali. Mereka tidak sadar bahwa kemajuan pariwisata Bali sangat tergantung dari keberhasilan menata budaya Bali yang adiluhur. Program Studi Bahasa Bali pada beberapa perguruan tinggi di Bali sepi peminat sehingga ada beberapa yang memberikan fasilitas bebas uang kuliah bagi calon mahasiswa bahasa daerah Bali. Dengan cara itu pun sampai saat ini belum terjadi peningkatan yang signifikan.

Pemerintah Daerah Bali melalui Visi-misi *Nangun Sat Kerti Loka Bali* telah mengaggas berbagai kebijakan untuk menepis tudungan bahasa Bali tidak bisa dipakai

mencari uang. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Bali telah menerbitkan suatu regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 tentang Penyuluhan Bahasa Bali. Pemerintah Daerah Bali mengangkat penyuluhan bahasa Bali sebagai tenaga kontrak daerah yang ditugaskan di semua desa dinas dan kelurahan di Bali. Oleh karena kinerja para penyuluhan dinilai positif, tahun 2024 mereka telah diangkat sebagai P3K Tenaga Teknis Penyuluhan Bahasa Bali. Di samping itu, sejak tahun 2024 pula mulai ada pengangkatan P3K Guru Bahasa Bali. Dengan demikian tantangan bahasa Bali tidak bisa dipakai mencari uang telah terpatahkan. Belakangan ini banyak sekolah terutama di sekolah dasar yang belum memiliki guru bahasa Bali. Ini artinya peluang kerja untuk lulusan bahasa Bali telah disiapkan oleh pemerintah.

2.3.2 Upaya Pemertahanan Bahasa Bali pada Era Globalisasi

Menghadapi berbagai tantangan era globalisasi dan menjawab wacana bahwa bahasa Bali diambang kematian, pemerintah daerah Bali selalu mengambil langkah-langkah strategis yang dirancang untuk tujuan pemertahanan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Sangat disadari bahwa oleh karena Bali bertumpu pada pariwisata dan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, maka akar budaya Bali yaitu bahasa, aksara, dan sastra Bali patut diselamatkan, dipelihara, bahkan dikembangkan.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Bali adalah menerbitkan sejumlah regulasi terkait bahasa, aksara, dan sastra Bali yang berdampak pada kegiatan-kegiatan yang bernuansa bahasa daerah Bali. Regulasi yang dimaksud antara lain: (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa Daerah Bali pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyuluhan Bahasa Bali; (3) Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, dan (4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

Pada awal munculnya Kurikulum 2013, bahasa Bali dimasukkan sebagai sub mata pelajaran Seni Budaya. Banyak kalangan, terutama para guru bahasa Bali yang sudah menerima tunjangan sertifikasi resah karena tidak ada Mapel Bahasa Bali. Hal ini memicu gerak cepat para akademisi, linguist, sastrawan, dan para mahasiswa prodi Bahasa Bali membentuk Aliansi Peduli Bahasa Bali dan mengadakan demo terpimpin di Kantor DPRD Provinsi Bali. Tindak lanjut demo tersebut mengirim utusan Bali ke

Pusat Kurikulum Jakarta. Ketua Komisi 4 DPRD Bali (Bapak I Nyoman Parta), Kadis Pendidikan Provinsi Bali (Bapak Sujaya), Ketua Aliansi Bahasa Bali (Nyoman Suka Ardiasa) dan saya sendiri sebagai dosen (I Nyoman Suwija) berangkat ke Jakarta. Ternyata Kurikulum Bahasa Bali tidak ada di Puskur Jakarta yang menyebabkan tidak adanya pengakuan Mata Pelajaran Bahasa Bali.

Setiba di Bali, Aliansi Peduli Bahasa Bali menghadap Gubernur Bali Mangku Made Pastika. Segara digelar rapat khusus membicarakan masalah Kurikulum Bahasa Bali. Atas persetujuan gubernur, Kurikulum Bahasa Bali 2013 segera dirampungkan dan dikirim ke Pusat Kurikulum Jakarta. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah Bali menerbitkan Peraturan Gubernur Bali No. 20 Tahun 2024 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 2 ayat (1) Pergub tersebut menyebutkan Bahasa, aksara, dan sastra Bali diajarkan pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai mata pelajaran di Provinsi Bali. Pada Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Bupati dan Walikota dapat mewajibkan satuan pendidikan untuk mengajarkan bahasa, aksara, dan sastra Bali minimal 2 jam pelajaran per minggu.

Pergub tersebut di atas memperkuat posisi bahasa Bali sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib. Tunjangan sertifikasi guru akan dan akhirnya Mata Pelajaran Bahasa Bali tidak lagi ngesub pada Mapel Seni Budaya. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Berkat kerja keras dan persetujuan pemangku kepentingan di Bali, pada tahun 2024 mulai ada pengangkatan guru bahasa Bali sebagai tenaga PPPK.

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyuluhan Bahasa Bali. Segara dilaksanakan rekrutmen Tenaga Kontrak Non PNS Penyuluhan Bahasa Bali sebanyak desa dinas dan kelurahan yang ada di Bali. Para lulusan Bahasa dan Sastra Bali hampir seluruhnya terserap ditugaskan di desa dan kelurahan seluruh Bali. Oleh karena tugas dan fungsi para penyuluhan dipandang positif dan yang bersangkutan menunjukkan integritas dan kinerja yang bagus, akhirnya pada tahun 2024 Pemerintah pusat resmi mengangkat para penyuluhan bahasa Bali menjadi tenaga teknis P3K. Jadi, hal ini merupakan langkah strategis yang dapat berperan penting dalam upaya pengembangan dan pemertahanan bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Bali menerbitkan Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan sastra Bali sebagai penyempurnaan

Perda Bali Nomor 3 Tahun 1992 yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan era kesejagatannya saat ini. Salah satu bagian penting dari Peraturan Daerah Bali tersebut yaitu dibentuknya Lembaga Bahasa Bali yang membidangi upaya pengembangan dan pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali.

Perda Bali nomor 1 Tahun 2018 tersebut disusul kemudian dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pada Pergub Bali No. 80 Tahun 2018 diatur berbagai kebijakan sebagai berikut.

1) Pasal 2 Pelindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Pemerintah daerah melakukan pelindungan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui kegiatan: (a) inventarisasi, (b) pengamanan, (c) pemeliharaan, (d) penyelamatan, dan (e) publikasi.

2) Pasal 3 Penggunaan Bahasa Bali

Bahasa Bali digunakan sebagai sarana:

- a. komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali;
- b. komunikasi dalam segala kegiatan agama Hindu, adat, dan budaya Bali;
- c. pemberian informasi pada layanan masyarakat, baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia.

3) Pasal 4 Hari-Hari Berbahasa Bali

Bahasa Bali digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.

4) Pasal 5 Aksara Bali dalam Penulisan Papan Nama

Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama:

- (a) tempat persembahyang umat Hindu; (b) lembaga adat; (c) prasasti peresmian gedung; (d) gedung; (e) lembaga pemerintahan; (f) lembaga swasta; (g) jalan; (h) sarana pariwisata; dan (i) fasilitas umum lainnya.

5) Pasal 8 Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

Bulan Februari ditetapkan sebagai Bahasa Bali. Bentuk kegiatan Bulan Bahasa Bali antara lain: festival, lomba, pameran, pertunjukan, seminar, dan kegiatan lain yang relevan dengan melibatkan masyarakat. Seluruh

penyelenggara, petugas, dan peserta kegiatan Bulan Bahasa Bali wajib menggunakan Bahasa Bali.

6) Pasal 9 Lembaga Bahasa Bali

Gubernur membentuk Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui dinas yang menangani urusan kebudayaan. Unsur Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali terdiri atas: (a) akademisi; (b) praktisi; (c) sastrawan; (d) budayawan; dan (e) seniman

7) Pasal 10 Penghargaan Bali Kerthi Nugraha Mahottama

- a. Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa terhadap pemajuan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- b. Penghargaan yang dimaksud disebut dengan nama Bali Kerti Nugraha Mahottama.
- c. Penghargaan diberikan setiap tahun kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) penerima
- d. Penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama berupa lencana emas, uang, dan sertifikat/piagam.

Di samping itu, sudah bertahun-tahun dilaksanakan berbagai kegiatan lomba yang bertujuan melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Di antaranya Porsenijar di tingkat kabupaten dan kota serta Porsenijar tingkat provinsi Bali; Ada Utsawa Dharmagita tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional; Ada Lomba Nyastrala pada setiap pelaksanaan Pesta Kesnian Bali, serta lomba-lomba yang dilakukan pada saat menyambut ulang tahun lembaga pendidikan formal dan juga pada tingkat banjar oleh karang taruna desa atau seka teruna. Sejak tahun 2021 PDIP Bali secara rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat Susastra Bali dalam rangka menyambut Bulan Bung Karno. Terkait penggunaan aksara Bali pada perangkat lunak, Pemerintah Daerah Bali juga meluncurkan Keyboard Aksara Bali.

3. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Bali sangat menyadari peran penting bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai akar budaya Bali yang

patut dilestarikan karena Bali bertumpu pada pariwisata budaya. Politik kebijakan pemerintah daerah Bali menegaskan bahwa sebagai warga negara yang taat azas, masyarakat Bali wajib menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, tidak melupakan bahasa Bali sebagai bahasa Ibu, dan patut juga mempelajari bahasa asing karena Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia.

Sampai dengan saat ini bahasa Bali masih eksis digunakan, baik pada situasi resmi maupun tidak resmi. Pada situasi resmi, bahasa Bali merupakan bahasa resmi pada ranah adat Bali, budaya Bali, dan agama Hindu. Rapat-rapat banjar, rapat desa adat, seka teruna, subak, pecalang, dan berbagai kegiatan upacara yadnya di Bali selalu menggunakan bahasa Bali. Pada situasi tidak resmi, terutama pada masyarakat desa yang penduduknya homogen, penggunaan bahasa Bali masih eksis.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pemertahanan bahasa Bali adalah arus globalisasi yang makin deras dan pergaulan masyarakat Bali yang makin kompleks dan majemuk serta menurunnya minat generasi muda untuk berbahasa Bali dan studi lanjut pada Prodi Bahasa Bali. Di samping itu ada faktor gengsi, bahwa bahasa Bali dipandang sebelah mata, dikatakan kuna, katrok, dan tidak bisa menghasilkan uang. Berdasarkan hal itu, pemerintah Bali melalui visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* tetap berupaya untuk melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali dengan menerbitkan berbagai kebijakan melalui regulasi di antaranya: Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Pergub Bali No. 19 Tahun 2016 tentang Penyuluhan Bahasa Bali; Perda Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan Pergub Bali nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan bulan Bahasa Bali.

REFERENSI

1. Foulcher, K. Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Pencitaan atas Simbol Kebangsaan Indonesia. Terjemahan Daniel S. Jakarta: Komunitas Bambu. 2000.
2. Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal. Oleh FISIP, UMSU. 2023. <https://fisip.umsu.ac.id/pengaruh-arus-globalisasi-terhadap-budaya-lokal/>
3. Sukrawati, Cok. Isteri. Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Bali. 2015; Jurnal ATAVISME. Volume 18, Nomor 2. <http://atavisme.kemdikbud.go.id/index.php/atavisme/article/view/118>
4. Purwo, Kiswanti. Bangkitnya Kebhinnekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Linguistik Univ. Atma Jaya, Jakarta.

5. Sedyawati, Edy. Kebudayaan dan Pembangunan: Dalam Masalah Budaya dan Pariwisata dan Pembangunan. Penyunting I Gusti Ngurah Bagus, Denpasar: Prodi Magister Linguistik Universitas Udayana. 2001.
6. Alam, Bachtiar. Civil Society dan Wacana Kebudayaan. Jakarta: Artikel Harian Kompas Selasa, 1 Juni 1999.
7. Visi “Nangun sat Kerthi Loka Bali” Menuju Bali Era Baru RSU Puri Raharja. Berita: <https://puriraharja.com> >berita>vi. 2020.
8. Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2018.
9. Peraturan Gubernur Bali No. 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2018.
10. Bagus, I.G.N., Yos Adi Riyadi, Naryana I.B., Agastia. I.B.G. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Bali. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Suweta, I M. Eksistensi dan Pemertahanan Bahasa Bali sebagai Budaya Lokal. Jurnal Purwadita, Volume 3 No. 1. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. 2021.